

**KOMUNIKASI TRANSAKSIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
DUALISME NAHDLATUL WATHAN (NW)**

**(Studi Kasus Penyelesaian Konflik NW Setelah Terbitnya SK Menkumham
No AHU00297.60.10.2014)**

**TRANSACTION COMMUNICATION IN RESOLVING DUALISM
CONFLICT NAHDLATUL WATHAN (NW)**

**(NW Conflict Resolution Case Study After the Issuance of Decree of the
Minister of Law and Human Rights No AHU00297.60.10.2014)**

Devaldi Firdauzan¹, Muhammad Jamiluddin Nur², Baiq Vira Safitri³, Diyah Indiyati³.¹²³
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

NW merupakan sebuah organisasi masyarakat (ORMAS) Islam yang berpusat di Pancor Kabupaten Lombok Timur. Setelah meninggalnya pendiri NW, NWDI dan NBDI dilansungkannya *Muktamar* NW ke-X yang menghasilkan Hj. Sitti Raihanun dan Hj. Siti Rahun. Keadaan ini memunculkan konflik di masyarakat berupa saling klaim siapa ketua PB yang sah dimata hukum. Hal tersebut kemudian mengerucut dengan diterbitkannya SK Kemenkumham No AHU00297.60.10.2014 pada tanggal 11 Juli 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pendekatan komunikasi transaksional yang dilakukan dalam penyelesaian konflik dualisme NW. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. subjek penelitian ini adalah pelaku organisasi di NW Pancor dan NW Anjani. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model Creswell. Dalam melakukan uji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian dualisme NW ini melalui melalui komunikasi transaksional melalui dua cara, yakni melalui isyarat seperti mengadakan *Islah*, dan juga melalui penyampaian pesan damai. Yang kedua melalui waktu, yang dimana kedua belah pihak menyampaikan pesan pesan transaksional melalui acara acara besar organisasi seperti HULTAH NWDI dan *Haul Al-Magfurullah*.

Kata Kunci : Komunikasi, Transaksional, Dualisme, NW

ABSTRACT

NW is an Islamic community organization (ORMAS) based in Pancor, East Lombok Regency. After the death of the founder of NW, NWDI and NBDI, the Xth NW Congress was held which resulted in Hj. Sitti Raihanun and Hj. Siti Rahun. This situation gives rise to conflict in society in the form of mutual claims as to who is the legitimate chairman of PB in the eyes of the law. This then led to the issuance of Decree of the Ministry of Law and Human Rights No AHU00297.60.10.2014 on July 11 2014. The aim of this research is to find out what form of

transactional communication approach is used in resolving NW dualism conflicts. This research is qualitative research with a case study approach. The subjects of this research are organizational actors in NW Pancor and NW Anjani. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The data analysis technique was carried out using the Creswell model. In testing the validity of the data, researchers used source triangulation techniques. The results of this research show that efforts to resolve NW dualism are through transactional communication in two ways, namely through signals such as holding Islah, and also through conveying messages of peace. The second is through time, where both parties convey transactional messages through major organizational events such as HULTAH NWDI and Haul Al-Magfurullah.

Keywords: Communication, Transactional, Dualism, NW

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap orang selalu berkeinginan untuk mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai putusan dan aturan sosial melalui sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Komunikasi dilakukan dalam upaya menjalin hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. komunikasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Komunikasi merupakan sebuah dasar dalam menjaga hubungan dan timbal balik manusia dengan manusia yang lainnya, baik antar individu maupun antar kelompok (Ariska., *et al.* 2022). Kurniawan., *et al* (2022) menjelaskan bahwa pendekatan komunikasi merupakan salah satu jalan dalam menyelesaikan suatu konflik di masyarakat. Kaitannya dengan hal tersebut, komunikasi juga dilakukan oleh elite dan para pimpinan salah satu organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni *Nahdlatul Wathan* (NW).

NW merupakan sebuah organisasi masyarakat (ORMAS) Islam yang berpusat di Pancor Kabupaten Lombok Timur. Organisasi NW didirikan oleh ulama dan satu-satunya pahlawan nasional yang berasal dari NTB yakni K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Perjalanan NW sebagai ormas Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah tidak berjalan mulus sama halnya dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Awal mula munculnya konflik organisasi adalah setelah meninggalnya pendiri NW pada Mei 1997. Setelah meninggalnya pendiri NW, NWDI dan NBDI dilansungkannya *Muktamar* NW ke-X yang dilaksanakan di Praya, Lombok Tengah pada tanggal 24-26 Juli 1998. Pada *Muktamar* tersebut menghasilkan Hj. Sitti Raihanun yang merupakan anak pertama *Syaikh* Maulana menjadi Ketua Pengurus Besar *Nahdlatul Wathan* (PB NW) (Abdurrazak dan Nadia, 2022). Hal tersebut memicu awalnya konflik atas dasar salah satu kubu yang tidak menerima pemimpin perempuan sebagai pemimpin ormas sesuai dengan asas dasar Islam karena bertolak belakang dengan adat,

budaya serta norma agama yang berada di suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berpegang teguh pada pemahaman *Male Dominated* (Nasip, 2017).

Konflik yang memunculkan dualisme tersebut kemudian berlarut sampai cucu *Syaikh* Maulana. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi merupakan merupakan anak dari Hj. Siti Rahun memimpin NW Pancor dan Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) Zainuddin Tsani memimpin NW Anjani. Keadaan ini memunculkan konflik di masyarakat berupa saling klaim siapa ketua PB yang sah dimata hukum. Saling klaim berupa adu argumen kemudian memunculkan perpecahan sampai dilapisan bawah yakni antar jamaah yang menimbulkan perpecahan.

Hal tersebut kemudian mengerucut dengan diterbitkannya SK Kemenkumham No AHU00297.60.10.2014 pada tanggal 11 Juli 2014 yang dalam SK tersebut termuat ketetapan TGB Zainul Majid sebagai ketua PB NW yang sah. Kepastian hukum tersebut tidak menjadikan konflik dan dualisme berakhir. Akan tetapi, Ketua PB NW Anjani yakni Hj Siti Raihanun menggugat SK tersebut mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian lanjut ke Mahkamah Agung (MA) sampai ke Kemenkumham dengan diterbitkannya SK No AHU-26.AH.01.08 tahun 2016 dengan dibatalkannya SK sebelumnya dengan menetapkan Hj Siti Raihanun sebagai Ketua PB NW yang sah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus. Menurut Creswell (2013:24) pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus), atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audio visual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram sesuai dengan kebutuhan data dan lokasi informan. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024. Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal. Adapun objek penelitian ini adalah organisasi NW. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model Creswell. Dalam melakukan uji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah NW dan NWDI

A. Sejarah NW

Organisasi *Nahdlatul Wathan* atau biasa disebut dengan NW merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid pada hari ahad tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 H yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (Noor., *et al*, 2014:186). Didirikannya organisasi NW didasarkan atas berkembang pesatnya dua induk madrasah yakni *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) dan madrasah *Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah* (NBDI) yang telah menjalar di berbagai pelosok pulau Lombok. Hal tersebut kemudian menjadikan dasar berdirinya NW sebagai induk dari kedua madrasah tersebut (Noor., *et al*, 2014:186). Gambaran perkembangan madrasah yang sangat pesat dapat diketahui dari cabang madrasah yang tercatat pada tahun 1953 yang telah berdiri sebanyak 64 madrasah yang terbagi menjadi 36 madrasah di Lombok Timur, 18 madrasah di Lombok Tengah serta 10 madrasah di Lombok Barat (Noor., *et al*, 2014:187).

Perkembangan madrasah NWDI dan NBDI tersebut kemudian diwadahi dengan adanya NW melalui deklarasi organisasi pada tanggal 22-24 Agustus di Pancor, Lombok Timur dilaksanakan *Muktamar I* yang dihadiri oleh seluruh cabang madrasah NWDI dan NBDI serta para santri. *Muktamar I* tersebut menghasilkan keputusan-keputusan mengenai susunan Pengurus Besar *Nahdlatul Wathan* (PBNW), biro kepengurusan, pengesahan lambang organisasi, penetapan kedudukan serta penetapan program kerja pada masa bakti kepengurusan 1953-1958.

Sebagai sebuah organisasi formal, organisasi *Nahdlatul Wathan* mendapatkan legalitas yuridis berdasarkan akte Nomor 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Pembantu Hendrix Alexander Malada di Mataram yang bersifat sementara. Selanjutnya dibuat akte Nomor 50 Tanggal 25 Juli 1960 di hadapan Notaris Sie Ik Tiong di Jakarta dengan hasil penetapan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 menjadikan NW sebagai organisasi yang sah di Indonesia.

B. Sejarah NWDI

Pada dasarnya, *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) merupakan cabang-cabang dari madrasah NW. Cikal bakal terbentuknya madrasah NWDI adalah Pesantren yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan nama Al-Mujahidin pada tahun 1934 yang merupakan wadah belajar agama secara langsung untuk kaum muda. Pendirian pesantren ini

dilatarbelakangi oleh keinginan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid untuk memberikan pendidikan agama yang bermutu kepada Masyarakat. Pendirian madrasah NWDI tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Pada masa itu, pemerintahan Jepang yang sedang menduduki Indonesia mengintervensi pergerakan yang dilakukan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melalui provokasi kepada masyarakat bahwa madrasah NWDI merupakan madrasah yang menyebarkan ajaran Wahabi dan Mu'tazilah. Hal ini kemudian menjadikan 50 tanah wakaf untuk madrasah yang diberikan masyarakat dicabut baik yang di Pancor, Sakra maupun Praya.

Saat berbagai cobaan dan halangan yang diterima TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, datang seorang keluarga yakni Haji Syazali untuk menawarkan tanahnya menjadi tempat pendirian madrasah. Sehingga, hal tersebut kemudian mendorong TGKH. Zainuddin Abdul Madjid untuk membentuk panitia pembangunan madrasah yang berjumlah 15 orang. Dari pembangunan tersebut, kemudian mulai menjalar madrasah-madrasah NWDI di berbagai tempat.

Munculnya Dualisme NW

Sejak meninggalnya pendiri sekaligus ketua PBNW yang membawahi seluruh madrasah di lingkungan NW yakni NWDI dan NBDI pada tanggal 21 Oktober 1997, kepengurusan yang menjabat saat itu memutuskan untuk melakukan *Muktamar* ke X pada tanggal 24-26 Juli Tahun 1998 yang bertempat di Praya, Kabupaten Lombok Tengah. *Muktamar* X tersebut dilaksanakan guna memilih ketua PBNW yang baru beserta aturan-aturan organisasi seperti muktamar pada biasanya. Akan tetapi, *Muktamar* X tersebut merupakan cikal bakal yang kemudian menjadi awal kemunculan dualisme di tubuh NW. Adapun hasil *Muktamar* X tersebut terdiri dari dua versi yakni versi Pancor dan versi Anjani sehingga menjadikan konflik dualisme hingga saat ini. Peneliti menjabarkan dua versi yang menjadi awal dualisme tersebut berdasarkan hasil wawancara dari kedua belah pihak sebagai berikut.

A. Versi Pancor

TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid memiliki dua anak yakni Hj. Siti Rahun yang merupakan anak pertama dan Hj. Siti Raihanun merupakan anak kedua. Pada saat pelaksanaan *Muktamar* X di Gedung KONI Praya Lombok Tengah, peserta *Muktamar* terbagi menjadi dua sisi yakni Hj. Siti Rahun dan Hj. Siti Raihanun. Pada saat itu, mekanisme awal pemilihan Ketua PBNW adalah pengajuan bakal calon dari masing-masing Pimpinan Wilayah organisasi NW. Pengajuan bakal calon Ketua PBNW tersebut menghasilkan 5 calon dimana 3 diantaranya adalah TGH. Maksud Ahmad, Hj. Siti Rahun dan Hj. Siti Raihanun yang dilaksanakan pada sore hari.

Keadaan tersebut kemudian memunculkan gelagat dan melakukan *manuver* ingin membenturkan kedua anak TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Setelah itu, tidak lama nama bakal calon muncul, Hj. Siti Rahun berdiri dan melakukan intrupsi kepada pimpinan sidang atas pencalonan dirinya seagai Ketua Umum PBNW.

B. Versi Anjani

Dualisme dalam organisasi seringkali terjadi karena adanya dua persepsi yang sama-sama saling mengukuhkan diri sebagai yang benar. Perbedaan pendapat yang pada akhirnya tidak memunculkan titik temu antara kedua belah pihak menjadikan persoalan dalam organisasi tidak dapat terhindarkan. Hal yang diperdebatkan terus menerus kemudian akan memunculkan dua kubu yang pada akhirnya menjadi dualisme. Dalam kisruh yang terjadi dilingkungan *Nahdlatul Wathan*, dualisme muncul akibat ketiadaan pihak yang mau mengalah terhadap hasil *Muktamar X* di Praya pada Juli Tahun 1998. *Muktamar* ini menjadi tonggak awal munculnya dua kubu dengan persepsi yang berbeda dan terus berkembang hingga saat ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh dua tokoh NW (NW Anjani) yakni Dewan Muhtahsyar Ro'is Awwal TGH. Lalu Anas Hasyri dan Ketua Pimpinan Daerah Nahdlatul Wathan (PDNW) Lombok Timur TGH. Muzayyin Sobri menjelaskan bahwa terdapat pihak yang berkhianat terhadap hasil keputusan *Muktamar X* Praya dimana ketetapan Ketua PBNW yang sah menurut hasil *Muktamar X* tersebut adalah Hj. Siti Raihanun sebagai calon yang ditetapkan.

Pada prosesnya, pemilihan calon dilakukan dengan tahapan pertama yakni pemilihan bakal calon sesuai dengan tata tertib yang berlaku saat itu. Dalam tata tertib tersebut, dijelaskan oleh TGH. Lalu Anas Hasyri bahwa tidak ada yang menyebutkan harus laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan bakal calon yang kemudian akan dipilih oleh 90 pemegang hak suara dengan unsur Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah (PW), serta Pengurus Daerah (PD). Pemilihan bakal calon tersebut kemudian dilansungkan dengan hasil yang tidak disangka-sangka yang menghasilkan Hj. Siti Raihanun (54 suara), TGH. Maksun Ahmad (34 suara), H. Mustamin (1 suara) serta 1 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Hasil tersebut menjadikan 2 calon yang sah sebagai calon ketua PBNW adalah Hj. Siti Raihanun dan TGH. Maksun Ahmad (Wawancara TGH. Lalu Anas Hasyri, 2023).

Setelah ditetapkan 2 orang sebagai calon Ketua PBNW, TGH. Maksun Ahmad mengundurkan diri atas dasar perbedaan pendapat terkait dengan *Madzhab* Syafii yang tidak membolehkan wanita sebagai pimpinan ORMAS Islam. Setelah pernyataan tersebut, kemudian diketuk palu sidang penetapan ketua PBNW yang kemudian disusul dengan bubarnya peserta sidang. Penetapan tersebut menurut TGH. Lalu Anas Hasyri sudah melalui prosedur yang sesuai dengan

aturan dalam organisasi. Sehingga, diumumkan ke semua jamaah bahwa Hj. Siti Raihanun secara sah menjadi Ketua PBNW.

C. Poin Perbedaan Versi Historis Dualisme NW

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kedua belah pihak, maka dapat ditarik beberapa perbedaan versi historis yang menjadikan dualisme NW terjadi hingga saat ini diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Perbedaan Proses Sidang

Berdasarkan klaim dari NW Pancor, saat penetapan bakal calon dilakukan skorsing terhadap sidang Mukhtamar dikarenakan perbedaan pendapat yang menjadikan Dewan Muhtahsyar saat itu tidak dapat menjawab pertanyaan untuk dipertimbangkan terkait pencalonan wanita sebagai ketua PBNW. Sedangkan, menurut klaim dari NW Anjani, Dewan Muhtahsyar PBNW menetapkan bakal calon wanita yakni Hj. Siti Raihanun yang dapat dimaknai bahwa boleh wanita sebagai bakal calon ketua PBNW tanpa adanya skorsing serta sidang diskorsing karena ISHOMA.

b. Waktu Sidang

Menurut klaim dari NW Pancor, waktu penetapan bakal calon adalah sore hari. Akan tetapi, pihak NW Anjani menjelaskan bahwa penetapan bakal calon dilakukan pada pagi hari dan berakhir pada siang hari dengan penundaan sidang karena ISHOMA.

c. Bakal Calon

Menurut klaim dari pihak NW Pancor, saat itu Hj. Siti Raihanun juga masuk dalam bakal calon sebagai Ketua PBNW, akan tetapi langsung ditolak secara prosedur dalam sidang bahwa Hj. Siti Raihanun tidak siap karena menyalahi AD dan ART organisasi. Adapun penetapan bakal calon dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Sementara itu, pihak NW Anjani menjelaskan dalam wawancara bahwa tidak ada Hj. Siti Raihanun sebagai bakal calon serta penetapan bakal calon dilakukan melalui voting.

d. Proses Penetapan Ketua PBNW

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pihak NW Pancor menjelaskan bahwa saat itu sidang diskorsing tanpa ada ketetapan Ketua PBNW yang sah dikarenakan Dewan Muhtahsyar tidak mampu menjawab pertimbangan peserta sidang. Sementara itu, pihak NW Anjani menjelaskan bahwa saat sore hari telah ditetapkan Ketua PBNW yang sah sesuai dengan prosedur dikarenakan 1 (satu) dari 2 (dua) calon mengundurkan diri sebagai calon.

Pola Komunikasi Internal dalam Proses Penyelesaian Konflik Dualisme NW

A. NW Anjani

Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, berumber dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh NW Anjani baik melalui Ketua Umum PB saat ini RTGB. Zainuddin Tsani bersama dengan orang kepercayaan yang meliputi TGH. Lalu Anas Hasyri, TGH. Muzayyin Sobri, Solehudin, Lc maupun Tuan Guru yang ada dalam ruang lingkup kepengurusan NW Anjani menunjukkan pola komunikasi yang digunakan adalah pola rantai.

Komunikasi pola rantai merupakan komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok organisasi dimana satu anggota dapat menyampaikan pesan kepada anggota di sebelahnya, kemudian penerima pesan akan melanjutkan dengan anggota lainnya dan berjalan seterusnya. Komunikasi pola rantai ini pada umumnya termuat pesan yang sering kita sebut dengan pesan berantai. Dimana, suatu informasi akan diteruskan secara terus menerus sampai pada muara informasi itu ditujukan.

B. NW Pancor

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari hasil wawancara bersama beberapa informan dalam internal NW Pancor, dapat diketahui bahwa pola komunikasi yang terjalin dalam lingkup internal NW Pancor adalah pola lingkaran dimana semua anggota dalam hal ini komunikator maupun komunikan berada dalam posisi yang sama dengan orang pertama. Hal tersebut disampaikan oleh H. Irzani dalam sesi wawancara bersama peneliti yang menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian konflik dualisme ini, komunikasi yang terjalin dalam lingkup internal sangat terbuka. Semua bahan diskusi yang merupakan hasil dari rekonsiliasi bersama NW Anjani didiskusikan dengan musyawarah bersama, baik dengan kepengurusan inti PB NW Pancor maupun bersama dengan Dewan Muhtahsyar NW Pancor.

Komunikasi Transaksional dalam Penyelesaian Konflik Dualisme Nahdlatul Wathan (NW)

Komunikasi merupakan suatu proses dimana sebuah interaksi antara komunikan dengan komunikator yang melakukan pertukaran pesan didalamnya yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi juga merupakan bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia sehari-hari. Harold D. Laswell membuat sebuah definisi singkat yang menjelaskan mengenai komunikasi bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan apa, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya (Cangara, 2019: 18).

Bentuk Komunikasi Transaksional dalam Proses Penyelesaian Konflik Dualisme NW

A. Komunikasi Verbal

Pada proses penyelesaian konflik dualisme NW, bentuk komunikasi transaksional yang dilakukan dalam proses penyelesaian dilakukan dengan komunikasi verbal. Dimana, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan. Komunikasi verbal ini dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan dalam agenda mediasi maupun komunikasi verbal yang dilakukan pada meja persidangan.

B. Komunikasi Nonverbal

Menurut Liliweri (2015) komunikasi nonverbal dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang disampaikan melalui isyarat, barang maupun waktu. Dalam proses komunikasi transaksional pada penyelesaian dualisme NW ini, komunikasi nonverbal sebagai upaya penyelesaian dualisme sesuai dengan pernyataan Liliweri dapat dibagi menjadi 2 yakni :

a. Isyarat

Pada tahun 2020, TGB. Zainul Madjid menyerukan pada Hultah NWDI untuk mengajak *Islah* antara NW Pancor dan Anjani. Dalam kesempatan lain, RTGB. Zainuddin Tsani pada Hultah NWDI Tahun 2019 menyerukan hal yang sama. Dimana dalam pernyataannya yakni “Tidak ada NW Pancor dan NW Anjani lagi, NW hanyalah satu” menunjukkan makna tersirat untuk ajakan *Islah*. Adanya waktu-waktu perayaan tersebut menjadi komunikasi intens antara NW Pancor dan NW Anjani pada masa dualisme.

b. Waktu

Untuk komunikasi transaksional yang menggunakan waktu seperti beberapa perayaan penting seperti Hultah NWDI, *Haul Al-Magfurullah* Maulana Syaikh dan acara-acara besar NW lainnya yang waktunya sudah pasti terlaksana pada saat bersamaan menunjukkan bahwa kedua organisasi ini berasal dari rahim yang sama. Peringatan-peringatan hari besar pada kedua organisasi NW di waktu-waktu tertentu menjadikan kedua kubu dalam satu ruang yang sama. Perayaan itulah yang kemudian mendorong beberapa pernyataan terlontar pada setiap hari besar salah satunya adalah Hultah NWDI.

Model Komunikasi Transaksional dalam Proses Penyelesaian Konflik Dualisme NW

Pada proses penyelesaian konflik dualisme NW yang terjadi sejak tahun 1998 komunikasi pola rantai dilakukan dalam upaya penyelesaian sebelum pada akhirnya disepakati untuk *Islah* pada tahun 2019 dengan ketetapan NW Pancor menjadi NWDI pada tahun 2021. Pesan-pesan ini tersampaikan melalui beberapa orang penting dalam organisasi masing-masing pemimpin dua kubu NW. Seperti dijelaskan oleh H. Irzani dalam wawancara yang dilakukan peneliti dimana disebutkan bahwa dalam beberapa kesempatan NW Pancor melalui TGB. Zainul Majdi

mengutus H. Irzani sebagai penyambung pesan kepada pihak NW Anjani dalam upaya melaksanakan *Islah*. Pesan tersebut tersampaikan kepada pihak NW Anjani dalam hal ini ketua umum saat itu yakni Hj. Raihanun serta ketua umum saat ini RTGB. Zainuddin Tsani melalui tangan kanannya yakni TGH. Lalu Anas Hasyri.

Gangguan

A. Gangguan Internal dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dualisme NW

Masukan ataupun gangguan yang didapatkan komunikator dalam hal ini TGB. Zainul Madjid dan RTGB. Zainuddin Tsani dalam proses penyelesaian dualisme NW ini merupakan salah satu hal yang menjadikan proses penyelesaian harus melewati waktu hampir 5 tahun (2017-2022).

Setelah dialog yang dilaksanakan pada saat penetapan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pahlawan Nasional. Gangguan-gangguan tersebut tentunya berasal dari orang dalam organisasi maupun jamaah yang belum menerima beberapa hal jika dilakukan islah.

Hal-hal tersebut berupa hak waris atas aset Darunahdlatain Pancor, kepengurusan PBNW secara umum, Ketua PBNW secara khusus serta catatan historis masa lalu yang menjadikan beberapa pelaku organisasi memberikan ransangan berupa gangguan terhadap keputusan-keputusan yang akan ditetapkan oleh masing-masing ketua PBNW yakni TGB. Zainul Majid dan RTGB. Zainuddin Tsani.

B. Gangguan Eksternal dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dualisme NW

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktara (2015) yang menjelaskan mengenai politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa peran Tuan Guru dalam kontestasi politik di Lombok khususnya dan NTB pada umumnya cukup kuat. Hal ini kemudian menjadikan masyarakat akan terpecah ketika salah satu Tuan Guru bersikap terhadap pilihannya dalam suatu kontestasi politik. Dalam beberapa waktu terakhir, kontestasi politik di Nusa Tenggara Barat secara umum dan Lombok Timur secara khusus menunjukkan peta pertarungan antara pihak NW Pancor dan NW Anjani. Hal tersebut diketahui dari beberapa kali kontestasi yang menjadikan konflik semakin memanas dan menjadi salah satu gangguan dalam penyelesaian dualism secara eksternal.

Masukan: Alur Pertemuan Kedua Belah Pihak

Pada dasarnya, masukan-masukan muncul dalam organisasi ketika jalur komunikasi yang telah dibentuk sebelumnya tidak menjadikan masalah atau konflik antar komunikator terselesaikan. Sehingga, beberapa pihak baik dalam organisasi itu sendiri maupun dari pihak eksternal memberi masukan guna menjadikan kedua pihak yang bertikai dapat diselesaikan. Hal tersebut juga menjadi landasan berbagai masukan yang didapatkan oleh kedua belah pihak yakni antara

pihak NW maupun NWDI melalui kedua pimpinannya yakni TGB. Zainul Majdi dan RTGB. Zainuddin Tsani. Puncak dari munculnya masukan-masukan tersebut muncul sejak ditetapkannya SK Menkumham Nomor AHU-0000810.AH.01.08 tahun 2019 yang menjadi SK terakhir dalam sengketa dualisme yang menetapkan TGB. Zainul Majdi sebagai pimpinan yang sah di organisasi NW. Penetapan tersebut memantik adanya demo besar-besaran oleh masa NW Anjani dibawah komando RTGB. Zainuddin Tsani yang menyebabkan kantor Kanwil Kemenkumham NTB disegel oleh masa (KoranNTB.com, 2019).

Penyelesaian Konflik Dualisme NW

A. Pengenalan

Konflik organisasi yang terjadi sejak tahun 1998 menjadikan ormas Islam Nahdlatul Wathan terdapat adanya dua kubu yang menjadi dualisme hingga tahun 2022 (Wawancara, H. Irzani, 2022). Dualisme ini berupa adanya dua pemimpin yang diakui dalam satu organisasi yang sama sehingga menjadikan jamaah dalam organisasi Nahdlatul Wathan menjadi terpecah dua yakni NW Pancor yang dipimpin oleh TGB. Zainul Majid dan NW Anjani yang dipimpin oleh RTGB. Zainuddin Tsani.

B. Permunculan Konflik

dualisme ini terjadi akibat perbedaan dua persepsi pada pimpinan yang sah berdasarkan hasil *Muktamar X* di Praya. Sejak saat itu, kedua kubu melaksanakan muktamar secara terpisah dalam waktu yang berbeda yang menjadikan *Nahdlatul Wathan* dualisme kepemimpinan. Dualisme ini menjadikan masyarakat dan jamaah bingung terhadap yang mana pemimpin yang sah dan tidak sah. Sehingga, jalur hukum ditempuh dalam mengukuhkan siapa yang sah.

C. Puncak Konflik

Pada proses dalam upaya mencapai *Islah*, konflik yang terjadi antara NW Pancor dan NW Anjani memanas pada puncaknya setelah kasus dualisme naik ke meja hijau (persidangan). Saling gugat dimata hukum dilakukan kedua belah pihak dengan kemenangan pada masing-masing proses. Proses pertama yang dimenangkan oleh NW Pancor dengan pemimpin organisasi yakni TGB. Zainul Majid digugat kembali ke MA dengan ketetapan Hj. Siti Raihanun sebagai pimpinan organisasi NW.

D. Antiklimaks

Upaya-upaya dalam menyatukan organisasi tidak hanya ditempuh melalui pengukuhan diri di depan hukum. Dalam pidato yang disampaikan ketua PBNW Pancor TGB. Zainul Majid pada momen Hari Ulang Tahun (HULTAH) *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* ke 86 pada tahun 2020, RTGB. Zainuddin Tsani selaku anak dari Hj. Siti Raihanun yang menjadi Ketua PBNW pada tahun 2019 berdasarkan hasil Muktamar XIV di Mataram menjelaskan bahwa tidak ada

lagi dualisme dalam NW (lombokpost.jawapos.com, 2021). Seruan tersebut merupakan buntut dari kesepakatan yang dilakukan oleh “dua NW” yang dilaksanakan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham NTB di Hotel Lombok Astoria pada tanggal 23 Maret 2021. Nota kesepahaman tersebut berisikan 7 poin kesepakatan diantaranya adalah *Nahdlatul Wathan* (NW) akan dikelola oleh Anjani dan *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) akan dikelola oleh Pancor.

E. Penyelesaian

Menurut H. Irzani (2022) selaku pihak dibalik komunikasi-komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak menyampaikan bahwa saat itu, antara kedua pimpinan organisasi NW yang sedang dalam jabatan masing-masing berdialog bersama bagaimana agar keduanya dapat berjalan beriringan meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Hal ini menjadi puncak dualisme dan tonggak berakhirnya dualisme. butuh waktu hampir 5 tahun hingga dualisme NW berakhir dengan bergantinya NW Pancor menjadi NWDI. Hal tersebut dikarenakan organisasi NW bukan hanya dari kalangan keluarga. Sehingga, dalam proses untuk mencapai islah dari NW Pancor dan Anjani memiliki banyak tantangan.

Kesimpulan

Upaya penyelesaian dualisme NW ini melalui komunikasi transaksional melalui dua cara, yakni melalui isyarat seperti mengadakan *Islah*, dan juga melalui penyampaian pesan damai. Yang kedua melalui waktu, yang dimana kedua belah pihak menyampaikan pesan pesan transaksional melalui acara acara besar organisasi seperti HULTAH NWDI dan *Haul Al-Magfurullah*. Namun, dalam prosesnya, penyelesaian konflik dualisme ini berlangsung lama. Hal itu dilakukan dengan naiknya perkara dualisme ke meja hijau guna mendapatkan validasi secara hukum NW mana yang sah.

Keadaan ini menjadikan Kemenkumham NTB menginisiasi mediasi yang kemudian membentuk adanya komunikasi transaksional antara NW Pancor melalui TGB. Zainul Majid dan jajaran serta NW Anjani melalui RTGB. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar utama dalam penyelesaian dualisme kepemimpinan NW Pasca diterbitkannya SK Kemenkumham No AHU00297.60.10.2014 yang dilandasi oleh 7 poin yang disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 2021, yang dimana salah satu poin dari 7 poin tersebut mengatakan bahwa *Nahdlatul Wathan* (NW) akan dikelola oleh Anjani dan *Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah* (NWDI) akan dikelola oleh Pancor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozak., dan Nadia, Khalimatus. 2022. Pandangan Tuan Guru terhadap Pemimpin Perempuan di Nahdlatul Wathan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4, No. 2. Hal 165-178
- Andrik. 2012. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Ambar. 2017. *Komunikasi Asertif yang Efektif-Pengertian dan Tekniknya*. Diakses pada 19 September 2022 melalui <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-asertif>
- Ariska, Pratiwi., Muchtar, Henni., Montessori, Maria., Nurman, S. 2022. Potret Interaksi Sosial Pekerja Perempuan pada Pabrik Pondk Batu Kapur Bukit Tui Kota Padang Panjang. *Journal of Civic Education*. Vol. 4, No. 3. Hal 380-387.
- Arni, Muhammad. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan, 2009. *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta : Kencana
- Cangara, Hafied, 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W. Jhon. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dasrun, Hidayat, 2012. *Komunikasi Antar Pribadi dan Mediana*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Effendi, Onong Uchja. 2009. *Ilmu, Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, Irham. 2014. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Hamdi, Saiful. 2014. *Nahdlatul Wathan Era Reformasi*. Yogyakarta: Nawa Institute.
- Kurniawan, Dody, dkk. 2022. Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Etnis. *Jurnal Massa*. Vol 2 No 1. ISSN 2775-9016.
- Liliweri, Alo. 2015. *Komunikasi Antarpersonal*. Jakarta: Pustaka Media.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nasip, A. 2017. *Imagolohi dalam Perspektif Gender pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Nahdlatul Wathan (NW)*. Mataram: Elic.
- Nurudin, 2019. *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- nw.or.id. 2016. *Sejarah Berdirinya NW*. Diakses Pada 12 Juli 2022 melalui <https://nw.or.id/profil/sejarah-berdirinya-nw.html>
- Rahmad, Jalaludin, 2017. *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Rejama Rosdakarya
- Saleh, Muwafik. 2014. *Pengantar Komunikasi Organisasi*. Universitas Brawijaya.

- Silviani, Irene. 2020. *Komunikasi Organisasi*. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- viva.co.id. 2019. *Sengkarut Nahdlatul Wathan*. Diakses pada 13 Juli 2022 melalui <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/1235457-sengkarut-nahdlatul-wathan>
- viva.co.id. 2020. *Sengkarut Nahdlatul Wathan, Dua TGB dimediasi*. Diakses pada 13 Juli 2022, melalui <https://www.viva.co.id/berita/politik/1256298-sengkarut-nahdlatul-wathan-dua-tgb-dimediasi?page=2>
- Wahjono, Imam, Sentot. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- West, Richard dan Turner, Iynn H. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi*. Salemba: Humanika.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo.